



**Laporan Bulanan Sekretariat Utama
Bulan Mei
2025**

KATA PENGANTAR

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu penting karena bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga pemerintah mengimplementasikan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Aplikasi SAKIP ini digunakan untuk mengobservasi dan menilai kinerja suatu instansi pemerintah. Badan Pangan Nasional menggunakan aplikasi SAKIP sebagai bentuk komitmen Badan Pangan Nasional kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang dipergunakan. Sekretariat Utama yang bertugas mendukung manajemen Badan Pangan Nasional wajib mengisi aplikasi SAKIP. Pengisian aplikasi SAKIP ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan aktualisasi program atau kegiatan di Sekretariat Utama di sepanjang tahun 2025. Tahap berikutnya menyusun Laporan Bulanan Sekretariat Utama yang berisi aktualisasi dari aktivitas, program dan kegiatan yang terjadi di Badan Pangan Nasional. Laporan ini disusun secara bulanan sehingga pelaporan kegiatan atau program yang sudah berlangsung di bulan itu. Selain itu, bahan dan data yang dipakai pada aplikasi SAKIP ini menggunakan instrumen penilaian yang berpatokan dengan implementasi dan realisasi kegiatan atau program yang dilaksanakan. Hasil dari dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi untuk laporan bulan berikutnya. Sekretariat utama mendapatkan alokasi berdasarkan aturan alokasi dalam BA 125 milik Badan Pangan Nasional dan uraian alokasi untuk Program Dukungan Manajemen serta diprioritaskan untuk pembayaran honor dan operasional kantor. Pemantauan atas penggunaan alokasi yang aturan dalam bulan Mei tahun 2025 harus tetap terlaksana agar efisien dan efektif. Kami berharap laporan ini bisa berguna untuk seluruh pihak dan sebagai referensi buat pemugaran aplikasi aktivitas kedepan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat kami harapkan pada rangka menyajikan laporan.

Jakarta, Mei 2025



Sarwo Edhy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I: Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang	2
1.2 Tujuan	4
1.3 Metodologi Penyusunan Laporan	4
BAB II: Rencana Kerja Output	5
BAB III: Pelaksanaan Kegiatan	8
3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan	9
4.1 Kesimpulan	34
4.3 Rekomendasi	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Mei 2025 Sesuai DIPA Revisi ke-6 Tanggal 28 April 2025.....	6
Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Mei Tahun 2025 Per Output dan Komponen Lingkup Sekretariat Utama	9
Tabel 3. Realisasi Keuangan Bulan Mei Tahun 2025 Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Realisasi dan Target Sekretariat Utama Tahun 2025 11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. DIPA Revisi 6 – 28 April 2025..... 35

Lampiran 2. Realisasi Sekretariat Utama Bulan 2025..... 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk masyarakat. Hal ini tergambar dari Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 yang menyatakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan yang dipercaya masyarakat perlu mengatur akan kebijakan terhadap pangan. Pemerintah mengatur tentang kebijakan pangan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dijelaskan tentang tugas, susunan badan, dan tata kelola dari Badan Pangan Nasional.

Fungsi yang diutamakan untuk Badan Pangan Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 adalah koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. Oleh sebab itu, Badan Pangan Nasional berfokus untuk mengatur kebijakan di bidang pangan. Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan BUMN di bidang pangan dalam mengerjakan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah, Badan Pangan Nasional berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola sistem pangan nasional yang transparan, akuntabel, loyal dan berkelanjutan serta berkoordinasi dengan instansi-instansi lain baik itu kementerian-kementerian lain maupun universitas-universitas untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagaimana visi Badan Pangan Nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022.

Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:

- 1 Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- 2 Pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi;
- 3 Pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- 4 Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional.

Sekretariat Utama

Laporan bulanan dibuat Badan Pangan Nasional secara periodik sebagai bentuk implementasi instansi negara yang bertanggung jawab atas anggaran yang digunakan untuk membantu masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai salah satu instrumen dalam pemantauan, jejak program atau kegiatan yang telah terlaksana dan evaluasi yang menggambarkan pencapaian dan bentuk realisasi terhadap target kinerja organisasi dalam periode bulanan. Pemantauan dan evaluasi menjadi penting untuk memastikan pencapaian target dapat berjalan sesuai yang ditetapkan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi permasalahan yang akan timbul di periode mendatang.

Hasil atas peninjauan dan evaluasi serta bentuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan dan pendayagunaan anggaran kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional pada bulan Mei 2025 dituangkan

dalam bentuk laporan peninjauan dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat Utama bulan Mei 2025. Laporan ini sebagai catatan dokumentasi realisasi fisik dan keuangan selama bulan Mei 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output lingkup Sekretariat Utama tahun 2025 baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan dan merepresentasikan program-program dan kegiatan-kegiatan di lingkup Sekretariat Utama di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Sekretariat Utama pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan, diantaranya:

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Sekretariat Utama periode bulan Mei 2025.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target periode bulan Mei 2025.

1.3 Metodologi Penyusunan Laporan

Metodologi penyusunan laporan meliputi:

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) dari Unit Kerja Eselon (UKE) 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II
RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja pada Sekretariat Utama selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Mei 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian Rincian Output (RO) dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi ke-6 pada bulan April 2025. Pada dokumen tersebut pada bulan Mei ditargetkan sebesar **7,16%** Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Mei 2025 Sesuai DIPA Revisi ke-6

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen		Alokasi Tahun 2025		Target Mei th. 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan 7,16% (Rp)	Fisik
WA-Program Dukungan Manajemen		108,854,211,000		7.795.794.703	-
6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional					
AEC-Kerja sama	Kerja Sama Bidang Pangan	824,972,000		59.059.115	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	325,011,000		23.277.788	
	Layanan Hukum	686,492,000		49.182.767	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2,373,720,000		169.974.352	
	Layanan Protokoler	580,600,000		41.577.040	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,070,261,000		76.622.688	
	Layanan Umum	7,844,720,000		561.508.352	
	Layanan Perkantoran	78,698,135,000		5.633.755.466	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	1,314,054,000		94.115.274	

.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	1,887,686,000		135.098.418	
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5,329,682,000		381.601.247	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771,904,000		55.260.486	
	Layanan Manajemen Keuangan	1,094,046,000		78.354.698	
	Layanan Audit Internal	2,327,594,000		166.590.750	
PAD-Peraturan Presiden	Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000		19.390.454	
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	3,232,560,000		231.466.496	
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	221,999,000		15.896.914	

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 53 output/RO dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 2,684,182,221,000,-** untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi keuangan pada bulan Mei Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per belanja dan per kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional sebagaimana tabel 2 dan tabel 3 berikut:

Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Mei Tahun 2025 Per Output dan Komponen Lingkup Sekretariat Utama

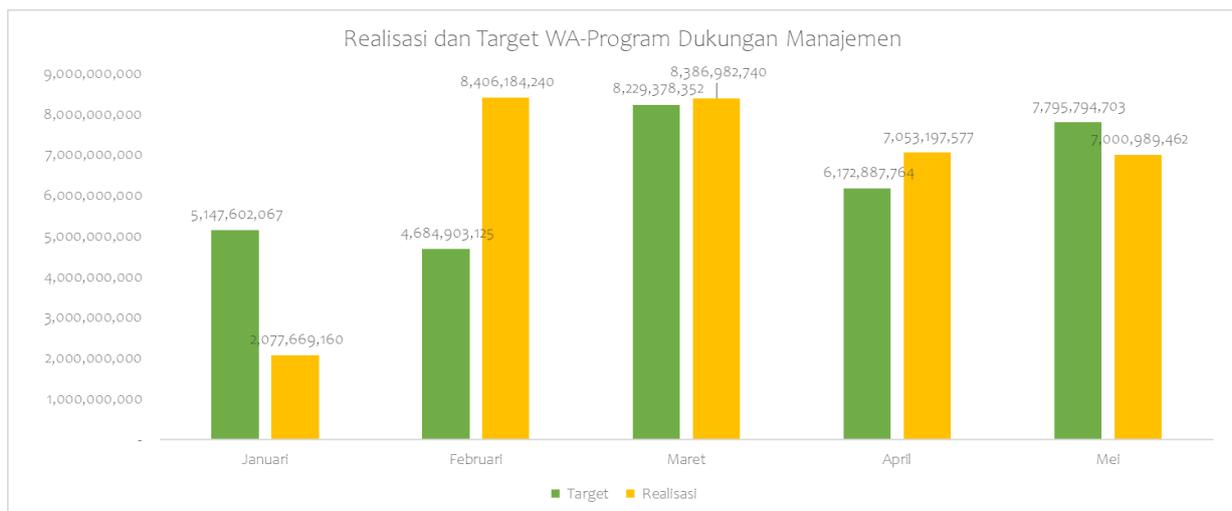
Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen		Target (7,16%)		Realisasi (SP2D)	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
WA-Program Dukungan Manajemen					
6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional		7.795.794.703		7,000,989,462	-
AEC-Kerja sama	Kerja Sama Bidang Pangan	59.059.115		13,523,092	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	23.277.788		21,921,000	
	Layanan Hukum	49.182.767		44,621,557	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	169.974.352		113,642,952	
	Layanan Protokoler	41.577.040		36,156,330	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	76.622.688		69,781,470	
	Layanan Umum	561.508.352		710,421,288	

	Layanan Perkantoran	5.633.755.466		5,114,032,404	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	94.115.274		113,600,000	
.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	135.098.418		79,026,364	
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	381.601.247		92,160,085	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	55.260.486		50,687,945	
	Layanan Manajemen Keuangan	78.354.698		40,896,000	
	Layanan Audit Internal	166.590.750		205,933,551	
PAD-Peraturan Presiden	Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional	19.390.454		9,700,000	
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	231.466.496		229,769,217	
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	15.896.914		55,116,207	

Tabel 3. Realisasi Keuangan Bulan Mei Tahun 2025 Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional

Program dan Kegiatan	Target 7,16% (Rp)	Realisasi Mei (Rp)	% (Dari Target)
Badan Pangan Nasional	192.129.472.624	10,055,223,323	5,24%
HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	184.408.493.516	3,054,233,861	1,66%
WA-Program Dukungan Manajemen	7.795.794.703	7,000,989,462	89,81%

Dari tabel 3 diatas, realisasi keuangan Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Bulan Mei Tahun 2025 telah terealisasi sebesar **Rp. 7,000,989,462 (89,81%)** dari target sebesar **Rp. 7.795.794.703 (7,16%)**. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka target, realisasi dan PAGU WA-Program Dukungan Manajemen akan terlihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Realisasi dan Target Sekretariat Utama Tahun 2025

3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional, Kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama pada periode bulan Mei Tahun 2025 telah ter-realisis anggaran sebesar **Rp.7,000,989,462,-** dengan prioritas kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

Sekretaris Utama

5 Mei 2025 - Rencana Kerja Pemerintah 2026: NFA Tegaskan Komitmen Dukung Kedaulatan Pangan



Jakarta - Badan Pangan Nasional (NFA) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh agenda prioritas pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, khususnya dalam mendorong terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Penegasan ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, se usai mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (5/5).

Dengan tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif,” RKP 2026 menetapkan pangan sebagai salah satu pilar utama

pembangunan nasional yang tidak hanya strategis secara ekonomi, tetapi juga fundamental bagi kemandirian dan ketahanan bangsa.

“Kedaulatan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal akses, distribusi, stabilitas harga, dan keadilan bagi petani serta konsumen. NFA akan terus menguatkan peran sebagai orkestrator kebijakan pangan nasional untuk memastikan seluruh ekosistem pangan berjalan selaras dan berkelanjutan,” ujar Sarwo Edhy.

“NFA siap menjadikan RKP 2026 sebagai momentum untuk mempercepat transformasi sistem pangan nasional, melalui kebijakan yang inklusif, berbasis teknologi, dan mengedepankan keberlanjutan,” kata Sarwo.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam arahannya pada kegiatan tersebut menegaskan bahwa tema RKP 2026 “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” merupakan respons strategis terhadap tantangan global sekaligus landasan pelaksanaan 8 Prioritas Nasional.

Pemerintah mulai menyusun RKP 2026 dengan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius di kisaran 5,8% hingga 6,3%, didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat 5,5%–5,8%, konsumsi pemerintah 6,8%–8%, serta investasi 6,2%–7,2%. Sasaran ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan dan mempercepat transformasi menuju Indonesia Emas.

“Tema ini merefleksikan upaya kita untuk memperkuat ketahanan domestik menjawab tantangan global dan memastikan pembangunan yang berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Rachmat.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 harus benar-benar selaras dengan prioritas nasional dan arahan Presiden Prabowo. Selain itu, Wamenkeu menilai perlu dilakukan perubahan pola pikir dalam menyusun anggaran, tidak lagi dimulai dari belanja operasional

yang bersifat rutin, melainkan berangkat dari desain program terlebih dahulu.

“Kita tahu persis di dalam proses penyiapan anggaran, desain anggaran, biasanya kan bottom up. Kita harus berubah. Programnya yang duluan, bukan operasionalnya yang duluan. Mau bikin program apa, di situ ada belanja operasionalnya. Bukan operasionalnya dulu apa, baru sisa operasional adalah program.” ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan sinergi antara pusat dan daerah dalam menyusun dan mengeksekusi kebijakan pangan. “Perencanaan pembangunan ke depan menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berbasis data. Oleh karena itu, NFA akan memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha pangan.” ujar Arief.

6 Mei 2025 - Badan Pangan Nasional Bangun Zona Integritas, Dorong Birokrasi Bebas KKN



Jakarta, 6 Mei 2025 — Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mencanangkan Pembangunan

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada Selasa (6/5/2025).

Zona Integritas merupakan fondasi utama dalam Reformasi Birokrasi, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, efektif, dan efisien, serta menjauhkan institusi pemerintah dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus menjadi prasyarat dalam Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2021.

“Melalui penancangan ini, kita ingin menegaskan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk membangun budaya integritas, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Sarwo Edhy, Sekretaris Utama NFA.

Lebih lanjut, Sarwo menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dan core values yang menjadi dasar integritas aparatur negara. Ia juga menggarisbawahi bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bentuk kesungguhan dalam mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju birokrasi yang profesional dan bebas dari konflik kepentingan.

Sementara itu, Inspektur NFA, Imron Rosjidi, menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat bergantung pada kepemimpinan yang berintegritas dan keterlibatan aktif seluruh jajaran. “Reformasi birokrasi adalah langkah awal untuk menata sistem pemerintahan yang lebih baik. Namun lebih dari itu, harus ada kesadaran bersama untuk menjadikan integritas sebagai budaya kerja,” ujarnya.

Menurut Imron, dalam penilaian ZI, terdapat enam area perubahan yang harus dipenuhi, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Semua ini memerlukan komitmen dan kerja kolektif, bukan hanya dari pimpinan tapi seluruh pegawai.

Pemerintah terus mendorong pembangunan unit-unit kerja pelayanan sebagai percontohan birokrasi bersih dan profesional. Di lingkungan NFA, pencanangan ini menjadi momentum memperkuat komitmen kolektif, yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas oleh seluruh pimpinan tinggi pratama.

Langkah ini juga menjadi bentuk nyata dukungan Badan Pangan Nasional terhadap upaya nasional dalam mewujudkan good governance dan clean government demi pelayanan publik yang prima, khususnya dalam sektor pangan strategis. Dengan integritas yang kuat, NFA optimistis mampu menjadi institusi yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga kredibel dan terpercaya dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan.

6 Mei 2025 - Dukung Penuh Revisi UU Pangan, Badan Pangan Nasional Sampaikan Hasil Kajian UU 18/2012 Kepada Komisi IV DPR-RI



JAKARTA - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menyampaikan dukungan penuh terhadap proses revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang tengah dilaksanakan Komisi IV DPR-RI. Hal ini diungkapkan Sekretaris Utama NFA Sarwo Edy dalam Rapat

Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Panja Perubahan Ketiga atas UU Pangan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta (6/5/2025).

"Bahwa Badan Pangan Nasional berkomitmen dan mendukung dalam penguatan regulasi sektor pangan," ujar Sarwo.

Sarwo menjelaskan, UU Pangan perlu disesuaikan dengan situasi perkembangan dan tantangan nasional maupun global, termasuk terhadap isu perubahan iklim, penyempurnaan tata kelola pangan, upaya penyelamatan pangan, pengendalian kerawanan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, pengawasan keamanan dan mutu pangan, serta penguatan data dan informasi pangan.

Disampaikannya lebih lanjut bahwa substansi penyelamatan pangan sangat bermanfaat untuk mendongkrak perekonomian nasional sebab jika tidak diatasi, berpotensi menimbulkan kerugian mencapai 213 sampai 551 triliun rupiah per tahun.

"Inisiatif penyelamatan pangan ini selaras dengan target SDGs dan RPJMN 2025-2029."

"Khusus kaitan dengan pentingnya upaya penyelamatan pangan, ini juga menjadi perhatian khusus dari Komisi IV DPR-RI dalam RDP-RDP sebelumnya. Komisi IV pernah meminta Badan Pangan Nasional untuk mengkaji dan menyusun regulasi penyelamatan pangan. Oleh karena itu dengan adanya perubahan UU 18 Tahun 2012 ini, bisa sekaligus nanti disisipkan di salah satu bab, karena telah kami kaji dan bedah pasal per pasal," tambahnya.

Dalam kesempatan ini Ketua Komisi VI DPR-RI Siti Hediati Haryadi menjelaskan bahwa penguatan terhadap kebijakan pangan nasional sangat penting untuk dilakukan guna menjawab tantangan zaman, sehingga sesuai dengan tujuan salah satunya termasuk melalui penyempurnaan UU Pangan sebagai dasar penyelenggaraan pangan nasional.

“Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks seperti perubahan iklim, disrupsi rantai pasok global, dan dinamika ekonomi, diperlukan langkah-langkah strategis salah satunya adalah pembenahan tata kelola pangan nasional agar lebih adaptif, inovatif, dan responsif,” ujar Titiek.

Sementara itu di lokasi berbeda kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan pangan merupakan salah satu urusan yang menjadi perhatian khusus dari presiden Prabowo Subianto, yang juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat, sehingga kebijakan pangan harus terus dikawal dengan baik dan presisi agar tetap sesuai dengan sasaran dan dapat menghasilkan dampak positif yang seluas-luasnya bagi masyarakat, di kemudian hari.

“Jadi kebijakan pemerintah memang perlu terus dikawal jauh ke depan, perlu terus diadjust agar tetap sesuai dengan ruhnya, sesuai dengan situasi dan tantangan yang ada,” ujar Arief.

RDP Perubahan Ketiga atas UU Pangan diikuti oleh Panja Komisi IV DPR-RI dan dihadiri perwakilan dari Kemenko pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, dan Perikanan, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog.

8 Mei 2025 - Perkuat Ketahanan Pangan Papua Selatan, NFA Dukung Pendirian BUMD Pangan di Merauke



JAKARTA - Sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia, Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) mendorong pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dukungan ini disampaikan dalam pertemuan audiensi antara Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dan Bupati Merauke Yoseph B. Gebze di Kantor NFA, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa Merauke memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, yang jika dikelola dengan baik melalui BUMD, dapat menjadi motor penggerak ketahanan pangan regional. "Dengan pembentukan BUMD, potensi Merauke dapat dikembangkan secara profesional dan berkelanjutan, serta mampu memperkuat Cadangan Pangan Daerah dan menopang Cadangan Pangan Nasional" ungkap Arief.

Ia menegaskan bahwa NFA siap memberikan pendampingan teknis untuk mempercepat proses pembentukan BUMD Pangan tersebut. Selain itu, Arief menekankan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana pascapanen yang memadai, seperti bed dryer, rice milling unit (RMU), dan food station sebagai titik distribusi pangan strategis. "Dengan dukungan infrastruktur yang tepat, Merauke bisa menjadi pusat distribusi pangan utama di kawasan timur Indonesia," ujarnya.

Arief juga menyebutkan pentingnya integrasi hulu-hilir, termasuk penguatan sistem logistik pangan dan pemanfaatan teknologi digital untuk memetakan distribusi pangan secara real time di wilayah terpencil Papua Selatan.

Sementara itu, Bupati Merauke Yoseph B. Gebze menyampaikan bahwa meskipun wilayahnya dikenal sebagai lumbung pangan, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi, terutama terkait keterbatasan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan. Yoseph memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke telah menyusun sejumlah program prioritas, di antaranya penguatan kelembagaan keamanan pangan daerah,

pelatihan pengolahan hasil pangan untuk UMKM, pengembangan Kebun Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta peningkatan kualitas distribusi beras dan fasilitas pascapanen.

“Kami sangat berharap dukungan konkret dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk bantuan alat produksi, sarana pendidikan ternak sapi potong, maupun sistem distribusi pangan yang lebih terintegrasi,” tutur Yoseph.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), pengadaan mobil laboratorium keliling, bed dryer, RMU mini, hingga subsidi transportasi pangan antarwilayah. Dengan luas wilayah Papua Selatan yang mencapai lebih dari 446.000 km², distribusi pangan yang efisien menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi.

“Merauke bukan hanya memiliki potensi besar, tetapi juga posisi strategis untuk menopang ketahanan pangan nasional. Karena itu, sudah saatnya potensi ini dioptimalkan melalui sinergi pusat dan daerah secara konkret,” tegas Yoseph.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan berbasis wilayah, serta menjadikan kawasan-kawasan dengan potensi besar sebagai pusat produksi pangan nasional, demi mencapai swasembada pangan.

9 Mei 2025 - NFA Fasilitasi Mobil Untuk Distribusi Pangan Berlebih



SEMARANG – Penyelamatan pangan menjadi gerakan penting untuk mengurangi limbah makanan yang masih layak konsumsi, agar bisa didistribusikan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Untuk itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memfasilitasi daerah berupa mobil penyelamatan pangan untuk distribusi pangan berlebih ke masyarakat.

“Sejak tahun 2022, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) telah menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) sebagai bentuk komitmen dalam mencegah dan mengurangi sisa pangan,” ujar Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, saat meninjau pelaksanaan program penyelamatan pangan di Jawa Tengah, Jumat (9/5/2025).

Sarwo menjelaskan, upaya ini tidak bisa dilakukan oleh NFA saja, melainkan harus melibatkan kolaborasi lintas sektor. “Kami membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, komunitas penyelamat pangan, dan pihak swasta sebagai donatur,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa fasilitasi kendaraan operasional penyelamatan pangan ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses redistribusi pangan berlebih. “RPJMN 2025–2029 telah menetapkan target pengurangan sisa pangan sebesar 3–5% setiap tahun dari pelaku usaha dan konsumen. NFA sebagai instansi pengampu memiliki tanggung jawab untuk mencapainya,” tegas Sarwo.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan stakeholder seperti hotel, restoran, industri pangan, ritel, hingga bank pangan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penyelamatan pangan.

Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis, menambahkan bahwa pelaporan aktivitas penyelamatan pangan juga menjadi hal penting. “Untuk tahun 2025 ini, terdapat 5 unit kendaraan operasional penyelamatan pangan yang akan diberikan kepada daerah. Provinsi penerima masih dalam tahap verifikasi. Daerah yang mendapatkan fasilitas kendaraan wajib memanfaatkan dengan optimal dan melaporkan aktivitasnya secara rutin

melalui platform sbp.badanpangan.go.id agar capaian penyelamatan dapat terpantau,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari, menyampaikan apresiasinya atas dukungan kendaraan operasional ini. “Kendaraan ini sangat bermanfaat dalam mendukung kegiatan penyelamatan pangan di Jawa Tengah. Ke depan, kami akan dorong adanya Instruksi Gubernur agar gerakan ini semakin masif,” katanya.

Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, dalam pertemuannya dengan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang (MAFF) pada 29 April 2025 lalu juga menyampaikan bahwa Indonesia serius dalam menangani isu sisa pangan.

“Inisiatif bersama dengan para pemangku kepentingan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pengalaman saya di sektor ritel modern membuktikan bahwa pangan berlebih bisa dialihkan untuk membantu masyarakat rentan seperti lansia dan tunawisma,” ujar Arief.

Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk lebih bijak dalam mengelola pangan. “Mari kita hentikan pemborosan pangan demi ketahanan pangan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam kunjungan di Semarang tersebut, Sekretaris Utama NFA juga menyerahkan donasi pangan di UPTD Among Jiwo dan Panti Wredha Harapan Ibu. Donasi ini merupakan hasil kerja sama antara Food Bank of Indonesia (FOI) Semarang, Svarna Loka, dan para mitra swasta yang menyumbangkan pangan berlebih.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Endang Sarwiningsih Setyawulan, Kepala UPTD Among Jiwo Ambarsari, Ketua FOI Semarang, Ketua Svarna Loka, dan Pembina Panti Wredha Harapan Ibu.

15 Mei 2025 - Komisi IV Gandeng Akademisi Susun Ulang Regulasi Pangan, NFA: Ini Pondasi Menuju Indonesia Emas 2045



MALANG – Langkah cepat diambil Komisi IV DPR RI dalam upaya penguatan sistem pangan nasional. Bertempat di Universitas Brawijaya, Malang, Kamis (15/5/2025), Komisi IV menggelar forum diskusi strategis bersama para akademisi lintas fakultas guna menyerap masukan ilmiah untuk revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Sarwo Edhy, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa revisi UU Pangan ini merupakan langkah strategis yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan integrasi lintas sektor.

"Revisi UU Pangan ini tentunya membawa semangat penguatan kelembagaan sehingga kita bisa berharap ke depan pembangunan ketahanan pangan akan lebih kuat lagi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045." ujar Sarwo.

Dalam kesempatan tersebut, Sarwo Edhy didampingi oleh Rachmad Firdaus, Kepala Biro Organisasi, SDM dan Hukum NFA, yang juga turut berperan aktif dalam mendukung penyusunan regulasi ini.

Ia menambahkan bahwa peran akademisi sangat vital dalam proses legislasi. Pendekatan berbasis data dan evidence-based policy menjadi kunci utama

agar kebijakan yang lahir tidak hanya tepat sasaran, tapi juga berdampak jangka panjang.

“Badan Pangan Nasional terus bangun sinergi dengan daerah. Kita sudah kerja sama dengan Dinas Pangan di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi. Selain itu, kita perkuat peran analis ketahanan pangan yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Mereka ini adalah garda terdepan kita,” lanjut Sarwo.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyampaikan bahwa penyusunan ulang RUU ini perlu dibangun atas landasan ilmiah yang kuat dan responsif terhadap dinamika zaman.

“Kami ingin RUU ini hadir sebagai solusi konkret bagi tantangan pangan hari ini dan masa depan. Untuk itu, masukan dari akademisi menjadi sangat krusial,” jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Rektor Universitas Brawijaya, Widodo menyampaikan bahwa UB siap mendukung proses legislasi demi lahirnya regulasi yang kuat dan inklusif.

“Kami merasa terhormat dilibatkan. Ini menunjukkan kepercayaan kepada perguruan tinggi sebagai bagian penting dalam proses kebijakan publik. Semoga RUU ini nantinya benar-benar berbasis sains dan kepentingan rakyat,” tegas Widodo.

Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, dalam keterangan terpisah, menegaskan pentingnya momen ini sebagai bagian dari arsitektur besar menuju Visi Indonesia Emas 2045.

“RUU Pangan ini bukan sekadar pembaruan undang-undang. Ini pondasi kita untuk menata ulang tata kelola pangan secara nasional. Kita ingin sistem yang kuat, adaptif, dan siap hadapi tantangan ke depan,” tegas Arief.

Pertemuan ini merupakan bagian dari Prolegnas Prioritas 2025 yang menandai semangat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan ketahanan pangan yang holistik dan berkelanjutan. Forum diskusi tersebut dihadiri berbagai pihak, termasuk perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian

Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum BULOG, hingga akademisi lintas fakultas dari Universitas Brawijaya.

Seluruh masukan yang dihimpun akan diramu oleh Komisi IV bersama Badan Keahlian DPR RI menjadi bagian penting dalam penyusunan naskah akademik dan draf final RUU Pangan.

20 Mei 2025 - Ketahanan Pangan dan Kebangkitan Bangsa: NFA kawal program prioritas Presiden



Ketahanan pangan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pangan yang aman dan bergizi tidak hanya menjadi penopang kualitas sumber daya manusia, tetapi juga kunci menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional.

Hal ini disampaikan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (NFA), Sarwo Edhy, dalam sambutannya pada Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 di Kantor NFA, Selasa (20/5/2025).

"Kebangkitan nasional adalah ikhtiar berkelanjutan untuk menghadapi tantangan zaman. Indonesia terus konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan pembangunan dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Sarwo Edhy menekankan pentingnya membangun bangsa dari hal-hal mendasar. "Kami percaya, kebangkitan besar dimulai dari pondasi yang sederhana: kehidupan yang tenang, perut yang kenyang, dan hati yang lapang," tambahnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan dari Asta Cita yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Dalam hal ini, NFA memiliki peran strategis untuk memastikan pangan yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aman, bermutu, dan sesuai standar sanitasi.

"Sebagai bentuk dukungan terhadap program MBG, NFA terus memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan, khususnya untuk pangan yang dikonsumsi anak-anak sekolah dan balita," jelas Sarwo Edhy.

Program MBG menunjukkan dampak signifikan sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Data Kemenko Pangan per 9 Mei 2025 menunjukkan lebih dari 3,4 juta anak telah mendapatkan akses makanan bernutrisi, dengan target ambisius mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, dalam kesempatan terpisah, menegaskan komitmen NFA dalam menyukseskan program ini.

"NFA mendukung penuh kelancaran MBG dengan menjamin keamanan dan kualitas pangan, serta mengoptimalkan sumber daya manusia untuk mengawasi pelaksanaan di lapangan," ujarnya.

Arief juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. "Keberhasilan MBG membutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. NFA akan terus memperkuat pengawasan pangan segar serta meningkatkan edukasi pola konsumsi sehat dan bergizi," tambahnya.

Ia juga mengusulkan penguatan peran NFA dalam pengelolaan pasokan pangan, penanganan food waste di SPPG, serta pembentukan tim tanggap cepat untuk situasi darurat di lapangan.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali arah pembangunan nasional melalui Asta Cita—delapan misi besar pemerintahan yang bertujuan membawa perubahan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebangkitan sejati bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang keteguhan membangun fondasi yang kuat. Seperti akar yang tumbuh perlahan namun pasti, semangat kebangkitan diharapkan lahir dari nilai-nilai kemanusiaan yang kokoh dan menghasilkan keadilan serta kesejahteraan yang merata.

22 Mei 2025 - Sinergi Dukung Peternak Lokal, Pastikan Stok Daging Cukup Jelang Iduladha



PURWAKARTA – Kolaborasi antara pemerintah, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat peternak lokal menjadi kunci dalam mewujudkan sektor peternakan yang tangguh, khususnya dalam penyediaan daging sapi potong sebagai sumber protein hewani.

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kandang Hijrah Barokah Farm di Neglasari, Darangdan, Purwakarta, Kamis (22/5), untuk melihat langsung kondisi lapangan dan kesiapan peternak menghadapi momentum Iduladha.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, yang turut mendampingi kunjungan tersebut menegaskan bahwa Badan Pangan Nasional terus mendukung upaya peternak lokal dalam meningkatkan produksi pangan nasional.

“Kami menyambut baik upaya pemenuhan daging sapi dari dalam negeri. Ini menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan swasembada daging,” ujar Sarwo.

Ia menilai Kandang Hijrah Barokah Farm sebagai model kolaborasi yang efektif antara pelaku usaha dan peternak lokal. Kolaborasi ini, menurutnya, patut ditiru oleh daerah lain guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sarwo juga menyampaikan dukungan kepada PT Berdikari sebagai mitra usaha Hijrah Barokah Farm.

“Sebagai BUMN pangan, PT Berdikari diharapkan dapat terus memperluas jaringan kerja sama dengan peternak lokal, agar distribusi dan pengolahan produk pangan berjalan lebih efisien dan merata,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yovan, dalam kesempatan itu menyoroti pentingnya menjaga kesehatan hewan ternak menjelang Iduladha, mengingat mobilisasi ternak dalam jumlah besar berisiko menimbulkan penyebaran penyakit.

“Oleh karena itu, hari ini kita pastikan hewan kurban tersedia dalam kondisi sehat dan cukup. Jangan sampai distribusi besar-besaran ini menjadi celah penyebaran PMK atau penyakit lainnya. Ini harus kita kawal bersama,” tegasnya.

Menanggapi kegiatan ini, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi seusai menghadiri Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (22/5/2025) menyatakan bahwa keberpihakan pada peternak lokal adalah bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun kemandirian pangan.

“Badan Pangan Nasional berkomitmen mendorong penguatan ekosistem peternakan nasional. Kolaborasi seperti ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri dengan kualitas dan kuantitas yang baik,” ujar Arief.

Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah optimistis target swasembada daging dapat tercapai secara bertahap, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen.

Adapun berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional, stok daging ruminansia dalam kondisi yang cukup dan aman. Estimasi total ketersediaan mencapai 1,1 juta ton, sedangkan kebutuhan sekitar 766 ribu ton.

27 Mei 2025 - Program MBG: Sinergi Gizi, Edukasi, dan Lingkungan Menuju Indonesia Emas 2045



JAKARTA - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan pentingnya integrasi aspek lingkungan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari strategi nasional mewujudkan generasi sehat 2045. Program prioritas Presiden Prabowo ini ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat pada tahun 2026, sehingga membutuhkan desain yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi sirkular.

Dalam seminar bertajuk “Perspektif Lingkungan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” yang digelar di Jakarta, Selasa (27/5/2025), Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya dilihat dari aspek gizi dan pendidikan, tetapi juga kontribusinya terhadap kelestarian lingkungan.

“MBG bukan sekadar program penyediaan makanan, tapi juga investasi masa depan. Kita ingin membentuk generasi sehat yang sekaligus sadar lingkungan,” ujar Sarwo.

Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwignyo, menambahkan bahwa MBG adalah sarana penting untuk edukasi anak-anak mengenai konsumsi pangan yang bertanggung jawab.

“Melalui MBG, kita dapat menanamkan nilai-nilai keberlanjutan sejak dini, termasuk menghargai makanan dan mengurangi sisa pangan,” ujarnya.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2024 menunjukkan potensi food waste di sekolah mencapai 1,1–1,4 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, 451–603 ribu ton merupakan makanan berlebih yang masih dapat diselamatkan dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua JP2GI (Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia), Soen’an Hadi Poernomo, mengingatkan bahwa MBG juga berperan sebagai model kebijakan pangan berkelanjutan.

“Program ini harus menjadi contoh bahwa pemenuhan kebutuhan pangan bisa dilakukan tanpa merusak ekosistem. MBG adalah bagian dari solusi menghadapi krisis pangan dan iklim global,” tegasnya.

Seminar ini juga menyoroti tantangan besar Indonesia terkait sampah makanan. Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, sebanyak 23 hingga 48 juta ton sampah makanan dihasilkan setiap tahun, berdampak signifikan pada ekonomi dan lingkungan. Para narasumber mendorong

pendekatan ekonomi sirkular serta pemanfaatan pangan lokal untuk mengurangi jejak karbon.

Sebagai langkah nyata, pemerintah telah menetapkan target penyelamatan pangan sebesar 3–5% per tahun melalui Perpres No. 12 Tahun 2025. MBG diharapkan menjadi bagian integral dari upaya tersebut melalui strategi seperti edukasi gizi di sekolah, penguatan distribusi pangan, dan optimalisasi pemanfaatan sisa pangan.

Direktur Kewaspadaan Pangan, Nita Yulianis, mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir terhadap sisa makanan. “Sisa pangan yang layak konsumsi bukanlah sampah. Ini bisa dimanfaatkan kembali, dan yang tidak layak konsumsi bisa diolah menjadi kompos, pakan maggot, atau bahkan energi. Ini langkah konkret mengurangi beban TPA,” jelas Nita.

Sementara itu, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Rinna Syawal, menyoroti pola konsumsi generasi muda yang lebih tertarik pada makanan cepat saji.

“Data menunjukkan hanya 2,3–2,5% remaja usia 10–19 tahun yang mengonsumsi sayur dan buah lebih dari 5 porsi per hari. Generasi Z dan Alpha cenderung memilih makanan cepat saji tinggi kalori dan rendah serat,” paparnya.

Karena itu, ia mendorong semua pihak untuk menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman atau B2SA. Program MBG menjadi instrument yang baik untuk membiasakan generasi muda mengonsumsi pangan B2SA untuk tumbuh sehat, aktif, dan produktif.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa keberhasilan program MBG akan menjadi tonggak penting bagi pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

“Kita ingin memastikan generasi masa depan tumbuh sehat dengan akses gizi yang cukup, sekaligus punya kesadaran kolektif terhadap kelestarian lingkungan. MBG harus menjadi contoh praktik pangan berkelanjutan yang

tidak hanya mengenyangkan, tapi juga mencerdaskan dan menjaga bumi,” ujar Arief.

Seminar ini menjadi wadah sinergi multi-pihak untuk mendiskusikan strategi integratif antara peningkatan gizi, edukasi anak, dan pelestarian lingkungan, dalam satu program nasional yang berdampak luas.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Sekretariat Utama pada periode bulan Mei 2025 sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama adalah Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 108,854,211,000,- dari total pagu Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 2,684,182,221,000,- yang terdiri dari 6 Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan 15 Rincian Output (RO).
2. Realisasi keuangan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional pada bulan Mei 2025 mencapai Rp. 7,000,989,462 (89,81%) dari target sebesar 7.795.794.703 (7,16%)

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi di Sekretariat Utama adalah masih rendahnya realisasi anggaran pada beberapa MAK, bahkan ada yang masih 0 realisasinya pada awal tahun dikarenakan anggaran masih belum bisa digunakan pada saat awal tahun.

4.3 Rekomendasi

Tindak lanjut atas permasalahan di atas antara lain:

1. Penyelesaian dokumen pendukung sebagai syarat pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari alokasi ABT Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
2. Penyiapan SDM yang akan menangani pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi untuk mendorong realisasi keuangan dapat mencapai target yang telah direncanakan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. DIPA Revisi 6 Tanggal 28 April 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 125.01.1.690590/2025



03 4125 7004 0290 1645

Revisi ke 06
Tanggal : 28 April 2025

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Abstrak Anggaran Uraian:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (135)	BADAN PANGGAN NASIONAL	
2. Unit Organisasi	: (01)	BADAN PANGGAN NASIONAL	
3. Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA	
4. Kode/Nama Sdker	: (690590)	BADAN PANGGAN NASIONAL	
Sesuai	: Rp.	2.801.268.025.000	(DUA TRILYUN DELAPAN RATUS SATU MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:
04 EKONOMI
04.03 PERTANIAN, KEDHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan:

	Jumlah Uang
Terlampir	

C. Sumber Dana Berasal Dari:

1. Rupiah Murni	Rp.	2.801.268.025.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
D. Penarikan dana dilakukan melalui:			6. SBDN PDS	Rp.	0
1. KPPN JAKARTA V	(135) Rp.	2.801.268.025.000			

E. Pernyataan Isyarat dan Keterangan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjut dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dari Petikoran Penemuan yang tercantum dalam Halaman B DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggal jumbuh terhadap pengumuman anggaran yang terbung dalam DIPA Petikan sepenuhnya berlaku pada Pengumuman Anggaran/Pengumuman Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan build yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

BE
SUHASIL NAZARA
NP. 197011231999031000

Lampiran 2. Realisasi Sekretariat Utama Bulan Mei 2025

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PANGAN NASIONAL PUSAT
Data s/d tanggal 31 Mei 2025

URAIAN	PAGU REVISI	REALISASI PERIODE INI	REALISASI SP2D	%	REALISASI AKRUAL	%	SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA	2,684,182,221,000	10,055,223,323	79,248,396,830	2,95%	90,578,514,812	3,37%	2,604,933,824,170
WA	108,854,211,000	7,000,989,462	34,335,274,736	31,54%	45,169,612,170	41,50%	74,518,936,264
WA.6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	108,854,211,000	7,000,989,462	34,335,274,736	31,54%	45,169,612,170	41,50%	74,518,936,264
AEC Kerja sama	824,972,000	13,523,092	52,027,498	6,31%	170,394,782	20,65%	772,944,502
AEC.001 Kerja Sama Bidang Pangan	824,972,000	13,523,092	52,027,498	6,31%	170,394,782	20,65%	772,944,502
101 Kerja Sama Bidang Pangan	824,972,000	13,523,092	52,027,498	6,31%	170,394,782	20,65%	772,944,502
101.0A Kerjasama di Bidang Pangan	824,972,000	13,523,092	52,027,498	6,31%	170,394,782	20,65%	772,944,502
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	91,578,939,000	6,110,577,001	30,028,880,443	32,79%	38,767,691,479	42,33%	61,550,058,557
EBA.956 Layanan BMN	325,011,000	21,921,000	122,508,200	37,69%	125,519,200	38,62%	202,501,800
101 Layanan BMN dan Pengadaan	325,011,000	21,921,000	122,508,200	37,69%	125,519,200	38,62%	202,501,800
101.0A Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	153,140,000	4,530,000	63,787,200	41,65%	63,787,200	41,65%	89,352,800
101.0B Layanan Pengelolaan BMN	171,871,000	17,391,000	58,721,000	34,17%	61,732,000	35,92%	113,149,000
EBA.957 Layanan Hukum	686,492,000	44,621,557	101,558,031	14,79%	101,558,031	14,79%	584,933,969
101 Layanan Hukum	686,492,000	44,621,557	101,558,031	14,79%	101,558,031	14,79%	584,933,969
101.0A Layanan Hukum	351,350,000	30,517,625	64,703,625	18,42%	64,703,625	18,42%	286,646,375
101.0B Layanan Advokasi Hukum	166,542,000	14,103,932	36,854,406	22,13%	36,854,406	22,13%	129,687,594
101.0C Layanan Penguatan JDH, IRH dan IKK	168,600,000	0	0	0,00%	0	0,00%	168,600,000
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2,373,720,000	113,642,952	558,018,988	23,51%	656,418,996	27,65%	1,815,701,012
101 Layanan Hubungan Masyarakat	2,373,720,000	113,642,952	558,018,988	23,51%	656,418,996	27,65%	1,815,701,012
101.0A Layanan Humas dan Informasi Publik	2,373,720,000	113,642,952	558,018,988	23,51%	656,418,996	27,65%	1,815,701,012
EBA.959 Layanan Protokol	580,600,000	36,156,330	219,220,730	37,76%	219,220,730	37,76%	361,379,270
101 Layanan Protokol	580,600,000	36,156,330	219,220,730	37,76%	219,220,730	37,76%	361,379,270
101.0A Layanan Keprotokoliran	580,600,000	36,156,330	219,220,730	37,76%	219,220,730	37,76%	361,379,270
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,070,261,000	69,781,470	185,661,760	17,35%	185,661,760	17,35%	884,599,240
101 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,070,261,000	69,781,470	185,661,760	17,35%	185,661,760	17,35%	884,599,240
101.0A Layanan Manajemen Organisasi dan Tatalaksana	458,791,000	41,846,470	68,813,070	15,00%	68,813,070	15,00%	389,977,930
101.0B Layanan Reformasi Birokrasi	188,150,000	0	29,500,000	15,68%	29,500,000	15,68%	158,650,000
101.0C Pengembangan Jabatan Fungsional	423,320,000	27,935,000	87,348,690	20,63%	87,348,690	20,63%	335,971,310
EBA.962 Layanan Umum	7,844,720,000	710,421,288	2,630,094,305	33,53%	4,340,122,548	55,33%	5,214,625,695
101 Layanan Umum	7,844,720,000	710,421,288	2,630,094,305	33,53%	4,340,122,548	55,33%	5,214,625,695
101.0A Layanan Rumah Tangga Pimpinan	3,778,806,000	422,748,310	1,690,771,929	44,74%	1,818,172,656	48,12%	2,088,034,071
101.0B Layanan Dukungan Kesekretariatan	3,127,701,000	245,547,178	834,217,276	26,67%	2,414,381,792	77,19%	2,293,483,724
101.0C Layanan Tata Usaha Biro	330,560,000	4,160,500	4,160,500	1,26%	4,160,500	1,26%	326,399,500
101.0D Layanan Tata Usaha Pimpinan	298,413,000	15,112,300	76,591,600	25,67%	79,054,600	26,49%	221,821,400
101.0E Layanan Persuratan dan Kearsipan	309,240,000	22,853,000	24,353,000	7,88%	24,353,000	7,88%	284,887,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	78,698,135,000	5,114,032,404	26,211,817,429	33,31%	33,139,190,214	42,11%	52,486,317,571
001 Gaji dan Tunjangan	62,254,305,000	3,841,722,946	20,968,664,675	33,68%	26,372,503,460	42,36%	41,285,640,325
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	62,254,305,000	3,841,722,946	20,968,664,675	33,68%	26,372,503,460	42,36%	41,285,640,325
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	16,443,830,000	1,272,309,458	5,243,152,754	31,89%	6,766,686,754	41,15%	11,200,677,246
002.0A Administrasi Kegiatan	1,224,388,000	5,436,250	28,074,250	23,53%	335,556,250	27,41%	936,313,750
002.0B Terpeliharanya Kendaraan	2,248,257,000	265,286,130	522,267,678	23,23%	522,267,678	23,23%	1,725,989,322
002.0C Terbayarnya Layanan Telepon dan Listrik	906,000,000	0	35,000,000	3,86%	35,000,000	3,86%	871,000,000
002.0D Tenaga Teknis Lainnya	6,120,340,000	537,352,000	2,686,760,000	43,90%	4,162,812,000	68,02%	3,433,580,000
002.0E Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,890,095,000	464,235,078	1,705,790,826	29,01%	1,705,790,826	29,01%	4,174,304,174
002.0F Pelantikan Jabatan	64,750,000	0	5,260,000	8,12%	5,260,000	8,12%	59,490,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,314,054,000	113,600,000	808,907,080	61,56%	808,907,080	61,56%	505,146,940
EBB.951 Layanan Sarana Internal	1,314,054,000	113,600,000	808,907,080	61,56%	808,907,080	61,56%	505,146,940
101 Layanan Sarana Internal	1,314,054,000	113,600,000	808,907,080	61,56%	808,907,080	61,56%	505,146,940
101.0A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,314,054,000	113,600,000	808,907,080	61,56%	808,907,080	61,56%	505,146,940
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1,887,686,000	79,026,364	311,151,167	16,48%	417,151,167	22,10%	1,576,534,833
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	1,887,686,000	79,026,364	311,151,167	16,48%	417,151,167	22,10%	1,576,534,833
101 Layanan Manajemen SDM Internal	1,887,686,000	79,026,364	311,151,167	16,48%	417,151,167	22,10%	1,576,534,833
101.0A Layanan Manajemen SDM	397,606,000	26,251,364	148,769,167	37,42%	148,769,167	37,42%	248,836,833
101.0B Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1,228,930,000	35,375,000	100,732,000	8,20%	100,732,000	8,20%	1,128,198,000
101.0C Layanan koordinasi dan pemertanian negosiasi organisasi, union dan lainnya	261,150,000	17,400,000	61,650,000	23,61%	167,650,000	64,20%	199,500,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	9,523,226,000	389,677,581	2,161,705,191	22,70%	2,491,227,711	26,16%	7,361,520,899
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5,329,682,000	92,160,085	422,619,969	7,93%	645,282,489	12,11%	4,907,062,031
101 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5,329,682,000	92,160,085	422,619,969	7,93%	645,282,489	12,11%	4,907,062,031
101.0A Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5,329,682,000	92,160,085	422,619,969	7,93%	645,282,489	12,11%	4,907,062,031
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771,904,000	50,687,945	120,424,062	15,60%	121,284,062	15,71%	651,479,938
101 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771,904,000	50,687,945	120,424,062	15,60%	121,284,062	15,71%	651,479,938
101.0A Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771,904,000	50,687,945	120,424,062	15,60%	121,284,062	15,71%	651,479,938
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,094,046,000	40,896,000	367,730,900	33,61%	367,730,900	33,61%	726,315,100
101 Layanan Manajemen Keuangan	1,094,046,000	40,896,000	367,730,900	33,61%	367,730,900	33,61%	726,315,100
101.0A Layanan Perbendaharaan	378,141,000	2,896,000	110,124,900	29,12%	110,124,900	29,12%	268,016,100
101.0B Layanan Akuntansi dan Verifikasi	383,850,000	38,000,000	156,412,000	40,75%	156,412,000	40,75%	227,438,000
101.0C Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	182,734,000	0	32,220,000	17,63%	32,220,000	17,63%	150,514,000
101.0D Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan	149,321,000	0	68,974,000	46,19%	68,974,000	46,19%	80,347,000
EBD.965 Layanan Audit Internal	2,327,594,000	205,933,551	1,250,930,260	53,74%	1,356,930,260	58,30%	1,076,663,740
101 Layanan Audit Internal	2,327,594,000	205,933,551	1,250,930,260	53,74%	1,356,930,260	58,30%	1,076,663,740
101.0A Layanan Internal	406,834,000	22,607,550	67,457,550	16,58%	173,457,550	42,64%	339,376,450
101.0B Audit pada Satek lingkup Badan Pangan Nasional	560,000,000	0	220,767,715	39,42%	220,767,715	39,42%	339,232,285
101.0C Review kegiatan manufaktur dan kegiatan strategis pada satek lingkup Badan Pangan Nasional	224,000,000	42,577,120	158,219,484	70,63%	158,219,484	70,63%	65,780,516
101.0D Tindak lanjut Hasil Pengawasan Internal/ External	152,000,000	0	10,545,100	6,94%	10,545,100	6,94%	141,454,900
101.0E Pemantauan atas Pemertanian satek pada unit kerja lingkup badan	67,460,000	4,056,000	4,317,000	6,40%	4,317,000	6,40%	63,143,000
101.0F Pemantauan atas satek Kamtibmas APB dan pemertanian satek satek SPPD/Perencanaan Kualitas Makanan SPPD	120,000,000	0	67,327,100	56,11%	67,327,100	56,11%	52,672,900
101.0G Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis/Prioritas	240,000,000	1,430,881	239,283,066	99,70%	239,283,066	99,70%	716,934
101.0H Penyusunan NSPK	61,300,000	0	0	0,00%	0	0,00%	61,300,000
101.0I Reviu Bantuan Pangan	496,000,000	135,282,000	483,013,245	97,38%	483,013,245	97,38%	128,675,755
PAD Peraturan Presiden	270,775,000	9,700,000	16,430,000	6,07%	16,430,000	6,07%	254,345,000
PAD.001 RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000	9,700,000	16,430,000	6,07%	16,430,000	6,07%	254,345,000
101 Penyusunan RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000	9,700,000	16,430,000	6,07%	16,430,000	6,07%	254,345,000
101.0A Penyusunan RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000	9,700,000	16,430,000	6,07%	16,430,000	6,07%	254,345,000
OMA Data dan Informasi Publik	3,232,560,000	229,769,217	860,707,711	26,63%	2,402,344,305	74,32%	2,371,852,289
OMA.001 Data dan Informasi Pangan	3,232,560,000	229,769,217	860,707,711	26,63%	2,402,344,305	74,32%	2,371,852,289
101 Layanan Data dan Informasi Pangan	3,232,560,000	229,769,217	860,707,711	26,63%	2,402,344,305	74,32%	2,371,852,289
101.0A Peningkatan Layanan Jaringan dan Sistem Informasi	2,900,023,000	196,869					